

## ABSTRAK

### **Nurhayati: Norma Hukum Ijarah dalam Penetapan Tarif Pembayaran Jasa Angkutan Umum DAMRI (Studi kasus Pada Jasa Angkutan Umum Damri kantor Cabang Bandung)**

Transportasi menjadi salah satu ukuran penting dari *Good Governance* bagi pelayanan publik yang di nilai baik dan buruk. Kualitas pelayanan akan kebutuhan jasa transportasi umum khusus damri yang diberikan kepada masyarakat guna mempermudah dalam kegiatan. Dalam bidang muamalat, tidak mungkin manusia hidup individu dan tidak membutuhkan keperluan tanpa melibatkan orang lain. Pada hakikatnya manusia mahklus sosial, dimana tidak dapat bekerja sendiri dan sudah pasti membutuhkan orang lain. Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk bahwa dalam bertransaksi ada hubungan tolong menolong antar pihak guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Begitupula tujuan dari Perum DAMRI dalam Penetapan Tarif Pembayaran Jasa Angkutan Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penentuan Harga Pembayaran satu tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum Damri (2) Mekanisme sistem Pembayaran satu Tarif pada Jasa layanan Angkutan Umum Damri (3) Harmonisasi Norma Hukum Ijarah Terhadap sistem Pembayaran satu Tarif pada Jasa Angkutan Umum Damri.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran tentang Konsep Norma Hukum *Ijarah* terhadap penetapan tarif pembayaran Jasa Angkutan Umum di tinjau dari Norma Hukum *Ijarah*, teori harga dan teori ketetapan tarif sebagai landasan yang di sesuaikan dengan ketentuan peraturan Undang undang sebagai landasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas, yaitu Norma Hukum *Ijarah* dalam Penetapan tarif Pembayaran Jasa angkutan Umum DAMRI. Sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dengan masalah yang ada di Perum DAMRI mengenai penentuan Tarif. Analisis data menggunakan pendekatan Kualitatif. Kemudian dianalisis dan di tarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa (1) Sistem Penentuan satu tarif pada jasa layanan angkutan umum DAMRI mengikuti ketentuan surat edaran dari General Menager tentang ketetapan Tarif jauh dekat yang berlaku pada setiap rute yang berbeda. (2) Ketentuan Sistem Pembayaran yang memiliki landasan Hukum sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang, Peraturan Dinas Perhubungan, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Kota Bandung, dan Peraturan pemerintah tantang Perusahaan Umum (Perum) Damri bertolak Belakang dengan Perum Damri terapkan, yang beralasan penetapan Harga disesuaikan pada penyesuaian tarif berlaku jauh dekat (3) Mekanisme sistem Pembayaran satu tarif Berdasarkan Hukum Islam Harga Jasa ditentukan oleh sistem sewa yang ada pada ketentuan Ijarah. Yaitu adanya asas Keadilan, Tolong Menolong, Kerjasama, Kemanfaatan, Keridhoan, Kejujuran, Asas kebebasan dalam berakad. Dan Perum Damri tidak memiliki kriteria Tarif selain terbitnya surat edaran General Manager.